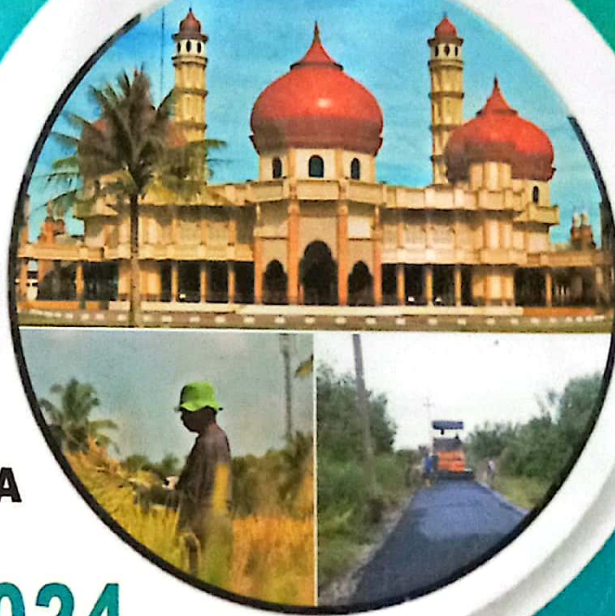




**PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 4
1.2	Landasan Hukum 5
1.3	Maksud dan Tujuan 7
1.4	Sistematika Penulisan 8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 41
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 80
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 82
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 95
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 105
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	122
BAB V	PENUTUP
	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat	12
Tabel 2.1.2	Capaian SDG’s Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023	30
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Aceh Barat	35
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
Tabel 2-5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat	81
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	94
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPK	96
Tabel 3.2.2	Sasaran Rencana Strategis Kementerian PP/PA, DP3A Provinsi Dan DP3AKB Kabupaten Aceh Barat	104
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Aceh Barat	106
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024	123

KATA PENGANTAR

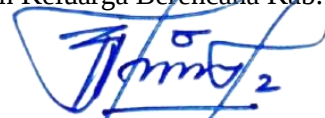
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya berpegang pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Undang-Undang/ peraturan serta dokumen-dokumen induk perencanaan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya Renja tersebut dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, disamping sebagai tolok ukur/ penilaian kinerja SKPK.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini kami mengucapkan terima kasih.

Meulaboh, Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat



TEUKU JUANDA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19660105 198801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam proses penyelenggaraan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik, tepat, akurat dan akuntabel yang akan memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan peka terhadap perubahan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

SKPD dalam menyusun suatu perencanaan atau Rencana Kerja berpedoman kepada beberapa dokumen induk antara lain Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Jangka Pendek serta Rencana Strategis SKPD, Undang-Undang dan beberapa peraturan terkait lainnya baik daerah ataupun pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe B sehingga memiliki Kepala Dinas, Sekretariat, tiga Bidang, dua Subbagian dan tujuh Seksi.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) disamping harus mampu mengakomodir dokumen-dokumen induk perencanaan yang telah disebutkan, harus juga mencerminkan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk itu dengan memperhatikan berbagai aspek dalam hal ini dokumen perencanaan daerah/ pusat, undang-undang dan peraturan yang terkait serta kondisi dan situasi daerah disamping juga memperhatikan prioritas kebutuhan dan anggaran telah menyusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2024.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032; (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 143);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024
24. Surat Edaran Bupati Aceh Barat Nomor: 050/02/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pemberitahuan Penyusunan RPD dan dukungan OPD dalam Penyusunan RPD

I.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan agar tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD selama 1 periode (setahun) demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien disamping sebagai penilaian kinerja SKPD untuk tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah :

1. Mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
2. Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan secara jelas dan terarah yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024;
3. Sebagai bentuk aplikasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari beberapa dokumen induk perencanaan yang telah ditetapkan baik oleh pusat maupun daerah;
4. Sebagai acuan dan pedoman bagi bidang/ seksi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan stakeholder terkait.

I.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

berisikan uraian mengenai :

1. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/ Internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs;
4. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang :

1. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilaksanakan).

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,
berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan/ sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RANCA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024, yang dituangkan pada tabel berikut 4,1

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk Tahun 2023-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun sebelumnya. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya, selain akan didapat persentase pencapaian kinerja/ target juga hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan sejauhmana program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas pencapaian kebutuhan yang diinginkan dalam masyarakat. Dengan adanya evaluasi tersebut maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Sebagai bentuk perbandingan untuk tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengelola anggaran sebesar Rp. 8.574.323.735,- dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 8.524.718.735,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 49.605.000,- dengan jumlah program sebanyak 8 (Delapan) dan jumlah kegiatan sebanyak 14 (Empat Belas) serta jumlah sub kegiatan sebanyak 25 (Dua Puluh Lima).

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengelola anggaran sebesar Rp. 11.997.255.473,- dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 10.993.725.977,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.003.529.496,- dengan jumlah program sebanyak 9 (Sembilan) dan jumlah kegiatan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) serta jumlah sub kegiatan sebanyak 40 (Empat Puluh).

Dan perkiraan sementara pada tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menerima anggaran dengan jumlah total Rp. 12.121.564.977,-

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d tahun berjalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat s/d Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6x10%)	9	10=5+7+9	11=10/4x100%
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									-
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									-
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Evaluasi SAKIP	B		B	B	100	B	B	B
		Jumlah Inovasi	1		1	1	100	1	1	1

2.08.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28		7	7	100	7	4	14,28
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12		3	3	100	3	6	50
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4		1	1	100	1	2	50
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4		1	1	100	1	2	50
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4		1	1	100	1	2	50
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4		1	1	100	1	2	50
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8		2	2	100	2	4	50
2.08.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Keuangan SKPK	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	16		4	4	100	4	8	50
2.08.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Umum perangkat daerah	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48		12	12	100	12	24	50

2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100		100	100	100	100	100	100
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jaringan Komunikasi, Air Bersih dan Listrik yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48		12	12	100	12	24	50

2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	48		12	12	100	12	24	50
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	48		12	12	100	12	24	50
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,30		85,67	85,97	100,35	85,87	85,87	97,24
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,50		65,21	56,69	86,93	57,30	57,30	97,94
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8,00		12,00	8,00	66,66	8,00	8,00	100
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	30,00		30,50	30,30	99,34	30,00	30,00	100
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70,00		69,50	69,70	100,28	70,00	70,00	100
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	20,00		49,85	40,85	81,94	19,00	19,00	95,00
		Jumlah OPD dan Desa yang Melaksanakan PPRG	369		369	369	100	369	369	100
2.08.02.2.01	KEGIATAN : PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	369		369	369	100	369	369	100
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen dan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	2		1	1	100	1	1	50

2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43		0	0	0	0	0	-
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43		0	0	0	0	0	-
2.08.02.2.02	KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah	70,00		69,50	69,70	100,28	70,00	70,00	100
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2		0	0	0	1	1	50
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15		8	8	100	0	8	53
2.08.02.2.03	KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,50		65,21	56,69	86,93	57,30	57,30	97,94
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat peningkatan	25		13	13	100	0	0	-
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang tersedia	4		0	0	0	1	1	25

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0,025		0,025	0,011	227,27	0,025	0,025	100
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi perempuan korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi perempuan korban Kekerasan	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi perempuan korban kekerasan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.01	KEGIATAN : PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	4		1	1	100	1	2	50

2.08.03.2.02	KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	100		100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapat pengaduan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	1		1	1	100	1	1	100
2.08.03.2.03	KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100		100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya manusia di Lembaga penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	13		13	13	100	13	13	100
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	3		1	1	100	1	2	66,66
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga Berkualitas	60		0	0	0	60	60	100
		Cakupan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten	60		0	0	0	50	50	83,33

2.08.04.2.01	KEGIATAN : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	65		0	0	0	65	65	100
2.08.04.2.01.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang tersedia	4		0	0	0	1	1	25
2.08.04.2.03	KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten	60		0	0	0	50	50	83,33
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya yang tersedia	1		1	1	100	1	1	100
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Profil Gender	1		0	0	0	1	0	0
		Tersedianya Profil Anak	1		0	0	0	1	0	0
2.08.05.2.01	KEGIATAN : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya Profil Gender	1		0	0	0	1	1	100
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/ Kota yang tersedia	2		0	0	0	0	0	-

2.08.05.2.01.02	Penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data	2		0	0	0	0	0	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Nindya		Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
2.08.06.2.01	KEGIATAN : PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase anak yang sudah terpenuhi hak nya	65		0	0	0	65	0	-
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	10		4	4	100	10	10	100
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	4		1	1	100	1	2	50
2.08.06.2.02	KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak	85		80	80	100	80	85	100
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	60		0	0	0	60	60	100
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	4		1	1	100	1	2	50
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	4		1	1	100	1	2	50

2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	4		1	1	100	1	2	50
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus anak yang diselesaikan	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Anak Korban Kekerasan	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan	100		100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.02	KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100		100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan mendapatkan Layanan Pengaduan	70		0	0	0	20	0	0

2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	1		1	1	100	1	1	100
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4		1	1	100	1	2	50
2.08.07.2.03	KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	100		100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Parasana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Parasana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4		1	1	100	1	2	50
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3		1	1	100	1	2	66,66
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3		1	1	100	1	2	66,66
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,89		1,97	1,97	100	1,92	1,92	101,58
		Total Fertility Rate (TFR)	2,41		2,77	2,44	88,08	2,44	2,44	101,24

		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,30		17,35	17,79	97,52	17,34	14,37	120,38
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	56,75		52,23	42,11	80,62	54,25	75,00	132,15
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	30,00		16,67	52,00	311,93	19,95	50,00	166,66
		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	70,25		91,99	38,80	42,17	65,00	0	0
2.14.02.2.01	KEGIATAN : PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4		4	4	100	4	4	100
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2		2	2	100	2	2	100
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal	1		1	1	100	1	1	100

2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	1		1	1	100	1	1	100
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2		2	2	100	2	2	100
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2		2	2	100	2	2	100
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	2		1	1	100	1	1	50,00
2.14.02.2.02	KEGIATAN : PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	30,00		16,67	52,00	311,93	19,95	50,00	166,66
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1		1	1	100	1	1	100
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan	1		0	0	0	1	0	-
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1		1	1	100	1	1	100

2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang dibentuk	48		48	48	100	48	48	100
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2		1	1	100	1	1	50,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1		1	1	100	1	1	100
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	2		1	1	100	1	1	50,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	70,40		70,40	63,12	89,65	77,60	0	0
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,00		8,67	9,21	106,22	8,73	0	0
		Persentase pengembangan Program KKBPK di Kampung KB	80,00		65,00	65,00	100	66,00	66,00	100

2.14.03.2.01	KEGIATAN : PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100		100	100	100	100	100	100
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	4		1	1	100	1	2	50
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100		10	10	100	30	0	0
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4		1	1	100	1	2	50
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	4		0	0	0	1	2	50
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	4		1	1	100	1	2	50
2.14.03.2.03	KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,00		8,67	9,21	106,22	8,73	0	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32.253		32.253	2.972	9,21	32.253	0	0

2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1		1	1	100	1	0	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12		12	12	100	12	12	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4		1	1	100	1	2	50
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100		25	25	100	30	55	55
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2.711		2.711	2.119	78,16	2.711	0	0
2.14.03.2.04	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	70,71		69,70	72,09	103,42	69.85	72,09	101,95
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31		31	31	100	31	31	100
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	48		48	48	100	48	48	100

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	60,00		45,00	45,00	100	45,00	45,00	75,00
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	100		100	100	100	100	100	100
		Cakupan Bina Keluarga Remaja di Desa	100		100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.01	KEGIATAN : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	100		100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	24		6	6	100	6	12	50
2.14.04.2.01.04	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	1.440		1.440	1.440	100	1.440	1.440	100
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	24		6	6	100	6	12	50

2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	192		48	48	100	48	96	50
2.14.04.2.02	KEGIATAN : PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Cakupan Bina Keluarga Remaja di Desa	100		100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4		1	1	100	1	2	50

Tabel 2.1.2
CAPAIAN SDGs KABUPATEN ACEH BARAT

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Indikator RPJMD	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs n-2	Capaian SDGs n-2 (2022)	Target SDGs n-1 (2023)	Capaian SDGs n-1
----------------	---------------------	-----------------	-------------	--------	------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------	------------------

						(2022)			(2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN									
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (proxy)	DP3AKB	Persen	100	100	100	100	100
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan /Memakai alat KB (proxy)	DP3AKB	Persen	64,73	70,40	63,12	70,60	0

	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3AKB	Persen	2,21	2,77	2,44	2,44	0
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER									
5.1.1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Jumlah Kebijakan pengarusutamaan Gender dan anak yang dihasilkan	DP3AKB	Angka	0	0	0	1	0
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	DP3AKB	Persen	100	100	100	100	100
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT	DP3AKB	Persen	0,226	0,025	0,011	0.031	0

5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	DP3AKB	Persen	100	100	100	100	100
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	DP3AKB	Persen	100	100	100	100	100
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	DP3AKB	Persen	25	25	25	25	25
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b)pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	DP3AKB	Persen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persentase partisipasi perempuan di	DP3AKB	Persen	69,70	69,50	69,70	70,00	70,00

		lembaga pemerintah							
5.6.1	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan /Memakai alat KB	DP3AKB	Persen	64,73	70,40	63,12	70,60	0
5.6.1	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	DP3AKB	Persen	57,22	65,21	85,97	85,87	85,87
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Tersedianya Profil Gender	DP3AKB	Persen	0	0	0	1	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat melakukan analisis kinerja pelayanan SKPD berdasarkan kajian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan yakni

Indikator SPM, IKU/IKK, Adapun analisis kinerja dapat disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(tahun n- 2)	(tahun n- 1)	(tahun n)	(tahun +1)	(tahun n- 2)	(tahun n- 1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	7	7	8	9	10	11	12
1	Hasil Evaluasi SAKIP	Tidak Ada	Ada	B	B	B	B	B		B	B	
2	Jumlah Inovasi	Tidak Ada	Ada	1	1	1	1	1		1	1	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Ada	Ada	85,67%	85,87%	86,70%	87,50%	85,97%		86,70%	87,50%	
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Ada	Ada	65,21%	57,30%	57,50%	58,00%	56,69%		57,50%	58,00%	
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (30%)	Ada	Ada	12,00%	3,00%	8,00%	8,00%	8,00%		8,00%	8,00%	
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Tidak Ada	Ada	30,50%	30,50%	30,00%	30,50%	30,30%		30,00%	30,50%	
7	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Tidak Ada	Ada	69,50%	70,00%	70,00%	69,50%	69,70%		70,00%	69,50%	
8	Partisipasi Angkatan Kerja	Tidak Ada	Ada	49,85%	19,00%	20,00%	20,00%	40,85%		20,00%	20,00%	

	Perempuan											
9	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	Tidak Ada	Ada	369	369	369	369	369		369	369	
10	Rasio KDRT	Tidak Ada	Ada	0,025%	0,031%	0,025%	0,031%	0,031%		0,025%	0,031%	
11	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
12	Cakupan Perempuan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
15	Presentase Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	Ada	Ada	-	85%	87,00%	87,00%	-		87,00%	87,00%	
16	Cakupan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten	Ada	Ada	-	50%	60,00%	60,00%	-		60,00%	60,00%	
17	Tersedianya Profil Gender	Ada	Ada	-	1	1	1	-		1	1	

18	Tersedianya Profil Anak	Ada	Ada	-	1	1	1	-		1	1	
19	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Ada	Ada	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya		Madya	Madya	
20	Persentase Kasus Anak yang diselesaikan	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
21	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
22	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
23	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Anak Korban Kekerasan	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
24	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
25	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Ada	Ada	1,97%	1,97%	1.97	1.94	1,92%		1.97	1.94	
26	Total Fertility Rate (TFR)	Ada	Ada	2,77%	2,44%	2,43	2,74	2,44%		2,43	2,74	
27	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Ada	Ada	17,40%	17,34%	17,33%	17,32%	17,79%		17,33%	17,32%	

28	Cakupan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Ada	Ada	52,23%	54,25%	55,00%	55,00%	46,94%		54,70%	55,00%	
29	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Tidak Ada	Ada	16,67%	19,95%	20,00%	25,70%	100%		20,00%	25,70%	
30	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Ada	Ada	65,00%	65,00%	65,30%	70,00%	52,32%		65,30%	70,00%	
31	Rasio Akseptor KB	Ada	Ada	70,40%	70,60%	71,40%	71,40%	63,12%		74,60%	71,40%	
32	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
33	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Ada	Ada	8,67%	8,73%	8,88%	8,92%	9,21%		8,88%	8,92%	
34	Persentase Pengembangan KKBPK di Gampong KB	Ada	Ada	-	66,00	66,00%	66,00%	-		66,00%	66,00%	
35	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Tidak Ada	Ada	4,50%	5,00%	5,00%	5,50%	4,50%		5,00%	5,50%	

36	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
37	Cakupan Bina Keluarga Remaja di Desa/ Gampong	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari indikator yang tertera diatas ternyata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana walaupun masih belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan namun telah berusaha maksimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan indikator yang ada dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, beberapa hal yang belum maksimal antara lain disebabkan oleh :

1. Kurangnya kemampuan/ kredibilitas SDM perencana sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya mengacu kepada IKU/IKK/SPM;
2. Kekurangan tenaga yang telah terlatih dalam pencapaian indikator kinerja terutama indikator Standar Pelayanan Minimal;
3. Tidak lengkapnya data dan informasi yang mendukung bagi SDM perencana untuk mengusulkan program yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
4. Kurangnya kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun bersangkutan yang sesuai dengan indikator-indikator yang ada sehingga pencapaian target dan kinerja tidak dapat dihitung;

Namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan antara lain :

1. Tertanganinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang laporannya dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
2. Adanya laporan masuk ke kepolisian yang telah tertangani dan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat putusan pengadilan;
3. Kapasitas tenaga terlatih di P2TP2A yang telah handal dan profesional;
4. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang terjangkau sebarang permintaan masyarakat;
5. Meningkatnya peserta KB aktif;
6. Tersedianya informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan.

Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan tersebut diatas yaitu :

- Kinerja pegawai dalam bidang pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah berpengalaman dan berkomitmen;
-

- Koordinasi dan pendampingan kasus oleh petugas dengan jejaring terutama dengan pihak kepolisian dan sebagainya.
- Penyediaan alat dan obat melalui dana APBN yang selalu mensuplai alat dan obat kontrasepsi berapapun permintaan.
- Adanya petugas wali data yang bertanggungjawab terhadap penyediaan data mikro keluarga.

Implikasi yang timbul akibat dari tercapainya target kinerja tersebut diatas adalah naiknya tingkat kesadaran masyarakat baik yang melaporkan kasus maupun pencegahan terhadap terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selanjutnya di bidang KB terciptanya rasa aman ditingkat stakeholder KB dan peserta KB terhadap ketersediaan obat dan sudut pandang stakeholder terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat dikarenakan gambaran yang diberikan oleh data dan informasi yang tersedia yakni melalui data mikro keluarga.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang harus disikapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Belum optimalnya implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan daerah
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dalam hal capaian hak-hak politik, ekonomi, dan sosial;
5. Rendahnya kesertaan ber-KB terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menunjang keseimbangan pertumbuhan penduduk;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dan hubungan kerjasama yang lebih erat dan terarah dengan pemangku kepentingan/ stakeholder terkait. Adanya persamaan sudut pandang/ persepsi dengan masyarakat dan stakeholder akan mampu mewujudkan suatu kondisi yang positif

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilancarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM baik dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan program/ kegiatan, penguasaan teknologi informasi dengan berbagai pelatihan dan bimbingan;
2. Adanya proses penilaian/ kelayakan terhadap program/ kegiatan yang akan direncanakan oleh aparaturnya terkait;
3. Melakukan pendekatan dan pengenalan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana beserta program/ kegiatan yang dilancarkan;
4. Meningkatkan hubungan kerjasama, koordinasi dengan pemangku kepentingan/ stakeholder atau instansi terkait guna mengoptimalkan program dan kegiatan yang dilakukan;
5. Tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) P2TP2A;
6. Tersedianya informasi dan data yang mendukung program/ kegiatan;
7. Mantapnya kapasitas fiskal Pemerintah;
8. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN ACEH BARAT

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				8.532.779.433	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				12.121.564.977	
			Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	80				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	80		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80				Indeks Kepuasan Masyarakat	80		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.087.971.199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.795.478.603	
			Hasil Evaluasi SAKIP	B				Hasil Evaluasi SAKIP	B		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	18.832.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	18.755.862	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6.664.410	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.989.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.144.422	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.072.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.510.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.051.420	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.072.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3.189.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2.895.610	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Terlaksananya Pengelola Keuangan SKPK	12	2.463.286.208	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Terlaksananya Pengelola Keuangan SKPK	12	2.183.375.284	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.447.916.208	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.158.802.084	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	15.370.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	24.573.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	167.843.555	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	176.607.908	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	37.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	36.947.408	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3.502.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	5.000.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	15.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	108.343.555	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	113.858.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	36.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	136.284.549	
	Pengadaan Mebel	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pengadaan Mebel	Kab. Aceh Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		36.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		136.284.549	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	294.880.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	147.200.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Aceh Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	16.080.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Aceh Barat	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	20.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	278.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	126.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Aceh Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	106.629.436	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Aceh Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	133.255.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	78.976.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	98.000.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	16.542.136	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	19.175.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	11.110.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	16.080.000	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Aceh Barat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,70	34.282.430	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Aceh Barat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,70	12.788.820	
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8,00				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8,00		
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta	30,00				Partisipasi perempuan di lembaga swasta	30,00		
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	51	17.943.000	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	51	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	1	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	1	-	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	12	3.943.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	12	-	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		14.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	70,00	6.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	70,00	-	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	1	-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	1	-	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		6.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70%	10.339.430	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70%	12.788.820	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan		5.339.430	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan		-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	65%	5.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	65%	12.788.820	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Aceh Barat	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,025	128.685.413	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Aceh Barat	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,025	229.797.591	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	100	15.685.413	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	100	54.557.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1	15.685.413	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1	54.557.500	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	93.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	148.380.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	65	78.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	65	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	1	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	1	148.380.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	20.000.000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	26.860.091	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	26.860.091	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	15.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga Berkualitas	60,00	28.723.966	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga Berkualitas	60,00	206.578.831	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	85,00	14.101.620	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	85,00	146.436.331	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga utk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga utk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1	110.224.909	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang Tersedia	1	14.101.620	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang Tersedia	1	36.211.422	

	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten	50,00	14.622.346	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten	50,00	60.142.500	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	14.622.346	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	60.142.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan anak yang dihasilkan	1	15.150.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan anak yang dihasilkan	1	26.200.000	

	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Profil Gender	1	15.150.000	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Barat	Tersedianya Profil Gender	1	26.200.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	8.150.000	Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	26.200.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	1	7.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	1	-	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Aceh Barat	Persentase anak yang sudah terpenuhi haknya	87	21.356.955	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Aceh Barat	Persentase anak yang sudah terpenuhi haknya	87	107.208.332	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Madya	7.856.955	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Madya	71.727.510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4	4.356.955	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4	51.095.266	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	1	3.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	1	20.632.244	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	85	13.500.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	85	35.480.822	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		3.500.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70,00	3.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70,00	35.480.822	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		3.500.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		3.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Aceh Barat	Persentase Kasus Anak yang diselesaikan	100	71.294.133	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Aceh Barat	Persentase Kasus Anak yang diselesaikan	100	38.635.000	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	47.294.133	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	38.635.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	70	30.300.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	70	38.635.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		7.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	9.994.133	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	-	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	100	24.000.000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	100	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		8.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/kota	65,00	8.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/kota	65,00	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		8.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Aceh Barat	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	55	38.762.790	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Aceh Barat	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	55,00	-	
			Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,94				Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,94		
			Total Fertility Rate (TFR)	2,74				Total Fertility Rate (TFR)	2,74		
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17,32				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17,32		
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	55,00				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	55,00		
			Jumlah Gampong KB Mandiri	1				Jumlah Gampong KB Mandiri	1		
			Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15 – 49	70,00				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Aceh Barat	Jumlah kerjasama penyelenggara n pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	5	10.022.790	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Aceh Barat	Jumlah kerjasama penyelenggara n pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	5	-	
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2	-	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2	-	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota		-	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	13	-	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	13	-	
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		-	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		10.022.790	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		-	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	-	Pelaksanaan Rapat Pengendalian KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	-	
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	19,95	28.740.000	Pemetaan Perkiraan Penduduk Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	19,95	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		18.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		-	
	Pemetaan Kependudukan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan		-	Pemetaan Kependudukan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan		-	
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1	-	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1	-	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (Penguatan SDM Pengelola Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		4.700.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (Penguatan SDM Pengelola Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	-	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		-	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		-	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan		6.040.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan		-	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Aceh Barat	Rasio Akseptor KB	71,40	5.077.255.982	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Aceh Barat	Rasio Akseptor KB	71,40	8.691.878.000	
			Persentase pengembangan Program KKBPK di Gampong KB	66,00			Kabupaten Aceh Barat	Persentase pengembangan Program KKBPK di Gampong KB	66,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Aceh Barat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	3.931.998.540	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Aceh Barat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	6.124.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Karifan Budaya Lokal	1	23.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Karifan Budaya Lokal	1	-	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	75	71.205.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	75	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		17.782.765	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Aceh Barat	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	85	3.715.010.775	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Aceh Barat	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	85	5.968.000.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	80	105.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya (Minilok)	80	156.000.000	

	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,73	977.389.480	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,73	1.814.878.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		-	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		-	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		-	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		577.627.310	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		946.830.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	80	394.762.150	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	80	868.048.000	

			Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan	75	-	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan	75	-	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran	75%	-	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Aceh Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran	75%	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Aceh Barat	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	69,85	167.867.982	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Aceh Barat	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	69,85	753.000.000	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	75,00	167.867.982	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	75,00	753.000.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga yang berkualitas mendapatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	70	29.296.565	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Aceh Barat	Persentase Keluarga yang berkualitas mendapatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	70	12.999.800	
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	55,00			Kabupat en Aceh Barat	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	55,00		
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	19.296.565	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	12.999.800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Jumlah Kader		4.296.565	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Jumlah Kader		-	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		10.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	75%	-	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	75%	12.999.800	
1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Aceh Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		5.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Aceh Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Cakupan Bina Keluarga Remaja di desa/gampong	100	10.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Aceh Barat	Cakupan Bina Keluarga Remaja di desa/gampong	100	-	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12	10.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Aceh Barat	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12	-	
	JUMLAH				8.532.779.433	JUMLAH				12.121.564.977	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang telah dilakukan selama ini ada beberapa usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, sebagian dari usulan tersebut dapat ditampung dan dianggarkan melalui APBK dan DAK Non Fisik, namun sebagian usulan lagi akan dianggarkan melalui dana gampong. Namun secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana masih sangat minim mendapat usulan program dan kegiatan pada Musrenbang, kekurangan usulan tersebut dicoba untuk melakukan analisa sehingga diperoleh beberapa kesimpulan yakni :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat;
2. Kurangnya pemahaman dan anggapan yang salah terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terutama dalam masalah isu gender dan KB sehingga menimbulkan keengganan untuk mengusulkan program/ kegiatan;
3. Masyarakat masih lebih mementingkan dan mengutamakan sarana fisik dari pada kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik.

Namun untuk tahun 2022 dengan diprakarsai oleh Bappeda Kabupaten Aceh Barat, telah melaksanakan untuk keempat kalinya kegiatan Musrenbang Perempuan, Anak dan Kaum Disabilitas, dimana seluruh SKPK dan stake holder terkait, semuanya ikut serta didalam Musrenbang tersebut, dimana didalam Musrenbang ini menampung semua permasalahan-permasalahan dan aspirasi yang menyangkut tentang perempuan, anak dan kaum disabilitas.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KABUPATEN ACEH BARAT

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada usulan
					Tidak ada usulan
					Tidak ada usulan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024. Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu pengertian dari kata Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdaulat** : Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Juga berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.
- Mandiri** : Kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Juga mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.
- Berkepribadian** : Bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa

diwujudkan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

Visi tersebut dijabarkan kedalam Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yaitu:

Adapun misi-misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu:

Tujuan

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian PP/PA.

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak melalui:
 - a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus yang ditandai dengan:
 - Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya perlindungan anak yang ditandai dengan:
 - Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian PP/PA melalui :
 - a. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP/PA.
 - b. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran:
 - Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;

- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
- d. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
- e. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
- f. Meningkatnya telaahan Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

3.1.2 Telaahan BKKBN Pusat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa BKKBN memiliki tugas dalam melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pada akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat Bangga Kencana. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program

Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun didalam Renstra BKKBN 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh tingkatan wilayah, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKKBN, Indikator Program/ Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil perhitungan/proyeksi capaian target pada RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMN dan Renstra periode sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra BKKBN 2020-2024 diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - a. *bonus demografi*; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami penurunan dari 2,41 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010), menjadi 2,40 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan;
 - b. *aging population*; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor

pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat;

- c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan
- d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangsa Kencana dilini lapangan.

2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;

- a. angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 5 kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana

target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak

kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

- b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4%. Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyoal pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
- c. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya

para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

- d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi unmet need sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya, diketahui bahwa unmet need lebih tinggi di daerah perkotaan (11 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (10 persen). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB; dan
- e. prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan

prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka Prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2

persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

- 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
 - a. *Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga* : Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun social budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk

mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan

- b. *Pernikahan usia anak* : Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada 1985, 26 persen pada 2010 dan 23 persen pada 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan “Perkawinan Usia Anak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi dipedesaan dengan angka 27,1persen, dibandingkan dengan diperkotaan (17,1persen). Permasalahan lain, perkawinan anak dibawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas

penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJP Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan;
2. Penurunan Jumlah Tindak Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi dan Diskriminasi Perempuan;
3. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan PUG dan Anak;
4. Ketersediaan Data;
5. Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan, Kesehatan, Hak Sipil dan Sosial;
6. Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Perlakuan Patut/ Salah.

Selanjutnya hasil telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket
A	Kebijakan Nasional		
	1. Implementasi Strategi PUG dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	Kementerian PP	
	2. Memformulasikan dan Mengharmonisasikan berbagai Regulasi Perlindungan Anak		
	3. Peningkatan Kapasitas dan Implementasi Perlindungan Anak		
	4. Meningkatkan Kerjasama dengan Stake Holder		
B	Kebijakan Provinsi		
	1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	RPJP Aceh 2005-2025	
	2. Penurunan Jumlah Tindak Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi, dan Diskriminasi Anak dan Perempuan		
	3. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan PUG dan Anak		
	4. Ketersediaan Data		
	5. Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan, Kesehatan, Hak Sipil dan Hak Sosial		
	6. Perlindungan Anak dari segala Bentuk Perlakuan Salah/Tak Patut		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Tujuan dan sasaran DP3AKB Kabupaten Aceh Barat tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 sedangkan sasaran adalah hasil akhir yang diinginkan dari tujuan yang telah dirumuskan dan diperkirakan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendapat sasaran yang diinginkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dibutuhkan sasaran yang rasional, terukur, spesifik dan mudah dicapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AKB beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program/ Pendanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kategori hasil evaluasi Lakip		B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah		86%	90%	95%	100%	100%	95%
	Meningkatkan PUG dan PUHA dalam semua aspek pembangunan, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak, partisipasi dan perlindungan anak	Meningkatnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		69,85%	66,28%	69,70%	69,50%	70,00%	70,00%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta		30,15%	33,72%	30,30%	30,50%	30,00%	30,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			Partisipasi angkatan kerja perempuan		16,40%	49,85%	49,85%	49,85%	19,00%	20,00%
			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		2,70%	2,60%	2,50%	2,60%	-	-
		Meningkatnya jumlah SKPK dan Gampong yang dilatih perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Jumlah SKPK dan Desa yang melaksanakan PPRG		369	369	369	369	369	369
		Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan anak dan peningkatan peranserta perempuan dan anak dalam semua aspek pembangunan daerah serta peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan yang ber-analisa gender dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		85,81%	85,76%	85,76%	85,67%	85,87%	88,30%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		83,70%	57,22%	57,22%	65,21%	57,30%	58,50%
	Menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya fungsi pelayanan kelembagaan P2TP2A	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan layanan re-integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		Turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT		0,07%	0,015%	0,225%	0,025%	0,031%	0,025%
	Meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian serta politik kaum perempuan	Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan dan perempuan dalam dunia usaha	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK		8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	8,00%	8,00%
	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang agar terciptanya keluarga kecil bahagia sejahtera	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama MKJP dan meningkatnya kesertaan KB pria	Total Fertility Rate (TFR)		2,87%	2,84%	2,21%	2,84%	2,44%	2,41%
			Rasio akseptor KB		63,00%	62,36%	64,73%	64,50%	70,60%	70,60%
			Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun		77,99%	80,09%	85,51%	85,00%	65,00%	70,25%
			Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		8,31%	6,79%	7,85%	8,54%	8,73%	9,00%
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		41,75%	45,60%	40,36%	46,15%	46,15%	46,15%
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		85,25%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		97,60%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		63,63	60%	66,07%	66,07	-	-
		Meningkatnya kualitas Kampung KB	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB		70,45	70,45	70,45	70,45	-	-
		Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan	Laju pertumbuhan penduduk		2,05%	5,40%	1,99%	2,02%	1,92%	1,89%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

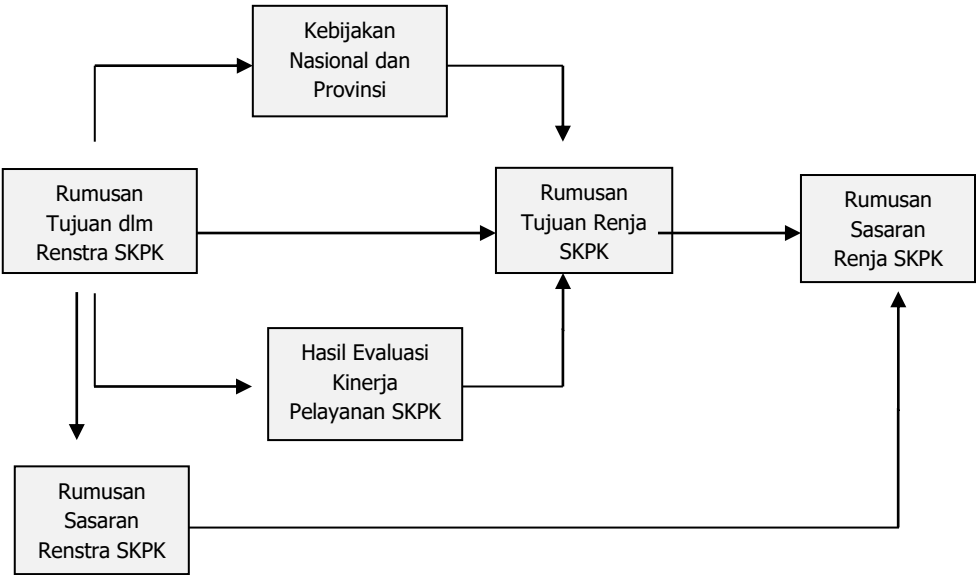
			Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		47,73%	50,00%	50,00%	50,50%	54,25%	50,50%
			Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	1	1	1	1	1
			Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		11	13	14	14	-	-
			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		3	4	4	4	-	-
			Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		11,11%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Menurunkan jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	Peningkatan usia perkawinan	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		5,95%	4,25%	5,82%	5,00%	-	5,00%
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)		19,90%	19,54%	17,72%	17,40%	17,34%	17,30%
			Rata-rata usia kawin pertama wanita		23,5	25	25	25	25	25
	Terwujudnya pola asah, asih dan asuh anak yang baik	Meningkatnya ketahanan keluarga, remaja dan kualitas balita	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan		16,67%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-
			Cakupan remaja dalam Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa		34	40%	38%	40%	45%	60%
			Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		71,88%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambaran alur mekanisme perumusan tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 3.1

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat



Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Sasaran Rencana Strategis BKKBN Pusat, BKKBN Aceh
dan DP3AKB Kabupaten Aceh Barat

NASIONAL (2020 – 2024)	PROVINSI (2020-2024)	KABUPATEN (2023 – 2026)
Menurunnya Angka kelahiran total/ Total Fertility Rate (TFR) 2,26% (2020) dan 2,1% (2024)	Menurunnya Angka kelahiran total/ Total Fertility Rate (TFR) 2,26 (2020) dan 2,1 (2024)	Ter-implementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78% (2020) dan 63,41% (2024)	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78% (2020) dan 63,41% (2024)	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama MKJP dan meningkatnya kesertaan KB pria
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,6% (2020) dan 7,4% (2024)	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,6% (2020) dan 7,4% (2024)	
Menurunnya Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) dengan target 25 per 1000 kelahiran (2020) dan 18 per 1000 kelahiran (2024)	Menurunnya Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) dengan target 25 per 1000 kelahiran (2020) dan 18 per 1000 kelahiran (2024)	Meningkatnya kualitas kampung KB
Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57& (2020) dan 21,00% (2024)	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57& (2020) dan 21,00% (2024)	Meningkatnya ketahanan keluarga, remaja dan kualitas balita
Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama dari 21,9 tahun (2020) dan 22,1 tahun (2024)	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama dari 21,9 tahun (2020) dan 22,1 tahun (2024)	Peningkatan usia perkawinan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :
 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Pencapaian SDGs;
 3. Pengentasan kemiskinan;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Jumlah program sebanyak 9, kegiatan berjumlah 22 dan sub kegiatan berjumlah 40;
 2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
 Untuk penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan ditahun 2023, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penyebarannya akan merata keseluruh Kabupaten Aceh Barat karena kegiatan yang dilaksanakan lebih ke penanganan kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak, untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selain yang sifat kegiatannya pengembangan di Kampung Keluarga Berkualitas maka penyebarannya difokuskan ke 48 Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat dan fokus utama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah penanganan penurunan stunting yang penyebaran kegiatannya merata ke seluruh gampong dan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
 3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan/ sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Berikut Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2024.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	2.795.478.603	B	3.475.118.441			
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	18.755.862	2	25.556.800	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6.664.410	3	6.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.144.422	1	3.287.900	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.051.420	1	2.761.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2.895.610	2	3.507.900	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelola Keuangan SKPK	Bulan	12	2.183.375.284	12	2.714.707.829	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	2.158.802.084	12	2.692.707.829	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	24.573.200	4	22.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	176.607.908	12	285.537.542	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.000.000	12	2.200.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.947.408	12	40.700.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	3.502.500	12	3.850.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.300.000	12	13.200.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.858.000	12	220.087.542	APBK	Kab. Aceh Barat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	6	136.284.549	2	2.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		136.284.549		2.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	147.200.000	12	314.594.500	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	800.000	12	1.094.500	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	20.400.000	12	14.300.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	126.000.000	12	299.200.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	133.255.000	12	132.221.770	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	98.000.000	unit	70.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	19.175.000	unit	50.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	16.080.000	unit	12.221.770	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	86,70	12.788.820	87,50	5.500.000			
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	Dokumen	70	-	75	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	Perangkat daerah	65	-	70	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat daerah	0,025	-	0,025	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender PPRG)	Persen	70	-	70	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Dokumen	70	-	70	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Organisasi	70	-	75	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	75	-	100	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Orang	70	12.788.820	75	5.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Dokumen	100	-	100	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persen	73,91	12.788.820	73,91	5.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rasio	0,025	229.797.591	0,031	39.253954			

2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	54.557.500	100	17.253.954	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	1	54.557.500		17.253.954	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	148.380.000	100	16.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	65	-	60	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan		148.380.000	55	16.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	26.860.091		5.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		26.860.091	12	5.500.000	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen	100	-	100	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	persen	60,00	206.578.831	61	22.500.000			
2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	persen	85,00	146.436.331	87	13.700.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan	dokumen	1	110.224.909	1	7.700.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.04.2.01.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang Tersedia	dokumen	1	36.211.422	1	6.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.04.2.03	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten	persen	50,00	60.142.500	60	8.800.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	layanan	100	60.142.500	100	8.800.000	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan anak yang dihasilkan	Kebijakan	1	26.200.000	1	8.965.000			
2.08.05.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Profil Gender	dokumen	1	26.200.000	1	8.965.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	26.200.000	1	8.965.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	dokumen	1	-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang sudah terpenuhi haknya	Persen	87	107.208.332	87	12.492.645			
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	kategori	Madya	71.727.510	madya	8.642.645	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi		51.095.266		4.792.964	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	dokumen	1	20.632.244	1	3.850.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	85	35.480.822	88	3.850.000	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	70,00	35.480.822		3.850.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	dokumen		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Anak yang diselesaikan	persen	100	38.635.000	100	8.800.000			
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	38.635.000	100	8.800.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	persen	70	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	persen		-	70	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	persen	1	-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	80	38.635.000	80	8.800.000	BOPA	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	100	-	100	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	gampong		-	80	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/kota	Persen	65,00	-	80	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen		-	80	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	persen	55	-	55	-			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	lembaga	5	-	5	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	dokumen	2	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	dokumen		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	satuan pendidikan	13	-	-	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Bersama Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	organisasi		-	-	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Bersama Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Bersama Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	organisasi		-	30	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	1	-	-	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	19,95	-	20	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen		-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	dokumen		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	dokumen	1	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (Penguatan SDM Pengelola Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	laporan		-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	laporan			1	6.040.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	Rasio	71,40	8.691.878.000	71,40	6.341.000.000			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	6.124.000.000	100	6.125.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Karifan Budaya Lokal	dokumen	1	-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	unit	75	-	75	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen		-	85	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	80	-	80	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan	85	5.968.000.000	85	6.000.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	80	156.000.000		125.000.000	DAK Non Fisik	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	8,73	1.814.878.000	8,88	30.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	laporan		-	4	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit		946.830.000		4.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	persen	80	868.048.000	85	26.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan	orang	75	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran	orang	75%	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	69,85	753.000.000	70,05	186.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	organisasi		-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	laporan	75,00	753.000.000	75	186.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang berkualitas mendapatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Persen	70	12.999.800	70	12.000.000			
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100	12.999.800	100	12.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Jumlah Kader	Laporan		-	1	-	APBK	Kab. Aceh Barat	

2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		-	66	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Laporan	75%	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		-	48	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	12.999.800	1	12.000.000	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Bina Keluarga Remaja di desa/gampong	Per sen	100	-	100	-	APBK	Kab. Aceh Barat	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	laporan	12	-		-	APBK	Kab. Aceh Barat	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisikan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024, seperti dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATANPERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kepmen 050)			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Kinerja	Kebutuhan	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.121.564.977			9.925.630.040			
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.416.687.177			3.572.630.040			
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.795.478.603			3.475.118.441			
2	08	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							18.755.862			25.556.800			
2	08	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terwujudnya sistem perencanaan yang akurat dan akuntabel	Tersedianya dokumen daerah	Aceh Barat	B Nilai	7 dokumen	100 persen	6.664.410	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	6.000.000	
2	08	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen daerah	Aceh Barat	B Nilai	3 Dokumen	100 persen	5.144.422	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	3.287.900	
2	08	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen daerah	Aceh Barat	B Nilai	1 Dokumen	100 persen	4.051.420	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	2.761.000	

2	08	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen daerah	Aceh Barat	B Nilai	2 Dokumen	100 persen	2.895.610	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	3.507.900
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.183.375.284				2.714.707.829
2	08	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	2.158.802.084	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	2.692.707.829
2	08	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Aceh Barat	B Nilai	4 triwulan	100 persen	24.573.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	22.000.000
2	08	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								176.607.908				285.537.542
2	08	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya bahan penerangan kantor	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	2.200.000
2	08	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	36.947.408	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	40.700.000
2	08	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	tersedianya alat kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	3.502.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	3.850.000

2	08	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	5.500.000
2	08	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	15.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	13.200.000
2	08	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	113.858.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	220.087.542
2	08	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								136.264.549					2.500.000
2	08	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya kebutuhan SKPK dalam melaksanakan pelayanan kantor	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	136.284.549	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	2.500.000
2	08	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147.200.000					314.594.500
2	08	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	1.084.500
2	08	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya jaringan komunikasi, air bersih dan listrik	Tersedianya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	20.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	14.300.000

2	08	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Meningkatnya kinerja administrasi kantor	Tersedianya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	126.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	299.200.000
2	08	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133.255.000				132.221.770
2	08	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terpeliharanya rutin kendaraan dinas	Tersedianya barang-barang kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	98.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	70.000.000
2	08	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terpeliharanya rutin gedung kantor	Tersedianya barang-barang kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	19.175.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	50.000.000
2	08	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terpeliharanya peralatan kantor	Tersedianya barang-barang kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Aceh Barat	B Nilai	12 bulan	100 persen	16.080.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	B Nilai	12.221.770
2	08	02	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								12.788.820				5.500.000
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								12.788.820				5.500.000
2	08	02	2	03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Terciptanya perempuan-perempuan yang kreatif dan mandiri	Menguatnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	85,76 Persen	65 persen	70 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,67 Persen	5.000.000
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								229.797.591				39.253.954
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								54.557.500				17.253.954

2	08	03	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Adanya pemahaman di masyarakat tentang uu perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	0,025 Rasio	70 persen	70 persen	54.557.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio KDRT	0,025 Rasio	17.253.954
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								148.380.000					16.500.000
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rasio KDRT	Lancarnya kegiatan P2TP2A	Meningkatnya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan di daerah	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	0,025 Rasio			148.380.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio KDRT	0,025 Rasio	16.500.000
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								26.860.091					5.500.000
2	08	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rasio KDRT	Lancarnya kegiatan P2TP2A	Meningkatannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	0,025 Rasio	100 persen	70 persen	26.660.091	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio KDRT	0,025 Rasio	5.500.000
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								206.578.831					22.500.000
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								146.436.331					13.700.000
2	08	04	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap anak	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	73,91 Persen	75 persen	70 persen	110.224.909	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73,91 Persen	7.700.000

2	08	04	2	01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE dan KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/ kota yang tersedia	Terlaksananya KIE dan KG bagi keluarga	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	73,91 Persen	75 persen	70 persen	36.211.422	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73,91 Persen	6.000.000
2	08	04	2	03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								60.142.500					8.800.000
2	08	04	2	03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Adanya peringatan hari anak nasional	Tersedianya dokumen layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa		100 persen		60.142.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8.800.000
2	08	05	2	01		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								26.200.000					8.965.000
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								26.200.000					8.965.000
2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Data Gender dan Anak	Adanya profil gender	Tersedianya data gender dan anak	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	50 Persen	100 persen	50 persen	26.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat Ketersediaan Data Gender dan Anak		8.965.000
2	08	06	2			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								107.208.332					12.492.645
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota								71.727.510					8.642.645
2	08	06	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Adanya kebijakan tentang pemenuhan hak anak	Tersedianya dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa				51.095.266	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4.792.645

2	08	06	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya sinergitas pelembagaan pemenuhan hak anak	Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa				20.632.244	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3.850.000
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								35.480.822					3.850.000
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya sinergitas pendampingan kualitas hidup anak	Tersedianya laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	73,91 Persen			35.480.822	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73,91 Persen	3.850.000
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								38.635.000					8.800.000
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								38.635.000					8.800.000
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	100 Persen	70 persen	70 persen	38.635.000					8.800.000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								8.704.877.800					6.353.000.000
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								8.691.878.000					6.125.000.000
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								5.612.353.000					5.612.353.000

2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Terwujudnya wawasan masyarakat dalam ber-KB dan meningkatnya Jumlah Akseptor KB	Meningkatnya KIE pengendalian penduduk dan KB	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	1,97 Persen	70 persen	70 persen	5.968.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,97 Persen	6.000.000.000
2	14	03	2	01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Adanya rapat koordinasi program KKBPK	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	1,97 Persen	100 persen	70 persen	156.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,97 Persen	125.000.000
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								1.814.878.000					30.000.000
2	14	03	2	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nyamannya ruang lingkup kerja PLKB	Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	1,97 Persen	100 persen	100 persen	946.830.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,97 Persen	4.000.000
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Adanya pelayanan KB di Faskes	Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	1,97 Persen	100 persen	100 persen	868.048.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,97 Persen	26.000.000
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								753.000.000					186.000.000

2	14	03	2	03	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu Kampung KB	Adanya pembinaan di Kampung KB	Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	1,97 Persen	100 persen	100 persen	19.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,97 Persen	
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								12.999.800					12.000.000
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								12.999.800					12.000.000
2	14	04	2	01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Meningkatnya kualitas balita	Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Desa	2,97 Persen	75 persen	70 persen	12.999.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,97 Persen	12.000.000
TOTAL														12.121.564.977					9.925.630.040

BAB V PENUTUP

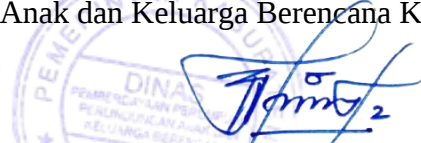
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat adalah berlandaskan pada beberapa dokumen induk yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat serta Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023-2026 serta beberapa dokumen terkait lainnya.

Dengan tersedianya Renja SKPD diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mampu mewujudkan program dan kegiatan yang maksimal, efektif dan efisien demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami berharap Renja tersebut akan menjadi salah satu faktor tercapainya prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2024.

Meulaboh, Juli 2023

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat



TEUKU JUANDA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19660105 198801 1 001

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat adalah berlandaskan pada beberapa dokumen induk yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat serta Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023-2026 serta beberapa dokumen terkait lainnya.

Dengan tersedianya Renja SKPD diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mampu mewujudkan program dan kegiatan yang maksimal, efektif dan efisien demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami berharap Renja tersebut akan menjadi salah satu faktor tercapainya prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2024.

Meulaboh, Juli 2023

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat



TEUKU JUANDA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19660105 198801 1 001